

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Ganing, P. (2019). *Analisis Pengakuan dan Pengukuran Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo*. Vol. 05 No. 02.

Juliarini, A. (2020). *Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. *Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020*, 1-10.

Ratuela, G. J., Grace.B.N, & Harijanto.S. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No.05*.

Wati, I. (2014, Agustus). *Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Pajak Daerah Pada PPK-SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang*. *Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi*, Vol.14 No.2, 127.

Karya Tulis Ilmiah Lainnya:

Ramadhan, W. (2021). *Tinjauan atas Utang dan Piutang pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Buku:

BPKAD. (2020). *Buku Saku Tahun 2020*. Sidoarjo.

Hamzah, A. P., & Aisyah Nur. K. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan : STAN Press.

Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.

Mulyana, B. (2014). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual*.

Savitri, E. (2016). *Konservatisme Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Sahila.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Lampiran I Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI.

Sumber Lainnya:

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*.

Diskominfo. (2019). *Indikator Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019*.

LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.

LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Website:

Kabupaten Sidoarjo. (2022). Retrieved from Portal Website Pemerintah Kabupaten Sidoarjo: <https://www.sidoarjokab.go.id/>

Pintek. (2021, Mei). *Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif & Kualitatif Beserta Tekniknya, Dibahas Secara Lengkap!* Retrieved from <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>

Setiawan, D. A. (2021, Juni Rabu). *Nilai Piutang Pajak Dianggap Tidak Wajar, Penagihan Aktif Digencarkan*. Retrieved from Trusted Indonesian Tax News Portal: <https://news.ddtc.co.id/nilai-piutang-pajak-dianggap-tidak-wajar-penagihan-aktif-digencarkan-30797>

Setiawan, S. (2021, Desember). *Studi Kepustakaan adalah* . Retrieved from <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>